



**PIDATO KETUA DPR RI  
PADA RAPAT PARIPURNA DPR RI  
PEMBUKAAN MASA PERSIDANGAN II  
TAHUN SIDANG 2010-2011**

**SENIN, 22 NOVEMBER 2010**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  
2010**



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA

**PIDATO KETUA DPR RI  
PADA RAPAT PARIPURNA DPR RI  
PEMBUKAAN MASA PERSIDANGAN II  
TAHUN SIDANG 2010-2011**

**SENIN, 22 NOVEMBER 2010**

***Assalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh,***  
**Salam Sejahtera bagi kita sekalian,**

**Yang kami hormati Para Wakil Ketua,**  
**Yang kami hormati Para Anggota Dewan,**

**Sidang Dewan yang terhormat,**

*Alhamdulillah* kita bersyukur kepada Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa, pagi ini kita bertemu kembali dalam keadaan sehat untuk mengawali kegiatan Dewan dalam masa Persidangan II Tahun Sidang 2010 – 2011.

Sebelum kami melanjutkan pidato Pembukaan Masa Persidangan II ini, izinkan dari mimbar Pimpinan, kami mengucapkan: **Selamat Hari Raya Idul Adha 1431 H,**

kepada para Anggota Dewan yang merayakannya dan kepada umat muslim di seluruh Indonesia. Idul Adha atau Hari Raya Qurban mengandung banyak nilai, makna, dan semangat untuk berkorban, tidak hanya bagi diri pribadi, tetapi juga bagi kehidupan sosial masyarakat.

Suasana Idul Adha kali ini masih diliputi keprihatinan yang mendalam, menyusul terjadinya rentetan bencana alam besar mulai dari Wasior, Mentawai, dan Merapi. Mudah-mudahan dengan semangat berkorban, akan menggugah nurani setiap insan Indonesia untuk rela berkorban bagi masyarakat kita yang sedang ditimpa bencana, mewujudkan solidaritas bersama, untuk ikut menanggulangnya dan membantu mereka yang sangat memerlukan uluran tangan kita. Ini semua merupakan manifestasi keteguhan kita di dalam membangun kebersamaan.

### **Sidang Dewan yang terhormat,**

Pada kesempatan Sidang Paripurna hari ini, kami beritahukan kepada Sidang Dewan yang terhormat mengenai adanya 3 (tiga) surat masuk yaitu 2 (dua) surat dari Presiden Republik Indonesia perihal permohonan pertimbangan bagi pencalonan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh dari

Republik Armenia, Republik Senegal dan Republik Kenya untuk Republik Indonesia; dan 1 (satu) surat dari Gubernur Bank Indonesia perihal rencana penyertaan Bank Indonesia di *Internasional Islamic Liquidity Management Corporation* (IILM). Ketiga surat ini akan diproses sebagaimana prosedur dan mekanisme Dewan.

Masa Persidangan II dimulai pada hari ini, tanggal 22 November 2010 dan akan berlangsung sampai dengan tanggal 17 Desember 2010, meliputi 19 hari kerja atau 26 hari kalender. Sedangkan Reses Persidangan II akan dimulai tanggal 18 Desember sampai 9 Januari 2011. Pada Masa Persidangan II yang relatif singkat ini, Dewan tetap akan melaksanakan tiga fungsi utama Dewan, yaitu pelaksanaan fungsi perundang-undangan, anggaran, dan pengawasan.

Disamping melaksanakan fungsi utama tersebut, pada Masa Persidangan II ini, Dewan juga mempunyai tugas terkait dengan penetapan pejabat-pejabat publik sebagaimana diamanatkan undang-undang. Pejabat publik yang dimaksud adalah 7 (tujuh) komisioner/anggota Komisi Yudisial (KY) dan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sebagaimana diketahui, pergantian anggota Komisi Yudisial telah mengundang polemik, mengingat masa keanggotaan Komisi Yudisial seharusnya telah berakhir pada

bulan Agustus. Keterlambatan dalam proses seleksi calon anggota Komisi Yudisial mengakibatkan adanya perpanjangan masa keanggotaan Komisi Yudisial melalui Keputusan Presiden. Polemik ini harus segera diakhiri. Berdasarkan mekanisme yang diatur dalam Tata Tertib DPR, Dewan melalui Komisi III akan segera melakukan pemilihan 7 (tujuh) anggota Komisi Yudisial dari 14 (empatbelas) orang calon yang diajukan oleh Presiden pada tanggal 23 September lalu. Komisioner baru yang terpilih nantinya diharapkan dapat meneruskan dan meningkatkan kinerja Komisi Yudisial sesuai dengan amanat konstitusi dan undang-undang.

Penetapan Pimpinan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) berikut masa jabatannya, diharapkan akan menjadi agenda Dewan pada Masa Persidangan II ini. DPR akan memilih 1 (satu) diantara 2 (dua) calon yang di ajukan Presiden, yaitu Saudara Busyro Muqoddas dan Saudara Bambang Widjojanto. Diantara 5 (lima) Pimpinan KPK, 1 (satu) diantaranya akan dipilih menjadi Ketua KPK.

## **Sidang Dewan Yang Terhormat,**

Dalam Bidang Legislasi, untuk Masa Sidang II Tahun Sidang 2010-2011 ini, diharapkan 6 (enam) sampai 7 (tujuh) RUU yang berasal dari DPR dapat diselesaikan pembahasannya untuk diambil keputusan pada Pembicaraan Tingkat II di dalam Rapat Paripurna. RUU tersebut adalah RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman; RUU tentang Mata Uang; RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi; RUU tentang Bantuan Hukum; RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun; RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Shodaqoh. Satu lagi yaitu RUU tentang Lembaga Keuangan Mikro.

Sementara 3 (tiga) RUU dari Presiden yang diharapkan dapat diambil keputusan pada Pembicaraan Tingkat II didalam Rapat Paripurna pada Masa Sidang ini adalah RUU tentang Transfer Dana; RUU tentang Informasi Geospasial, dan RUU tentang Otoritas Jasa Keuangan. Apabila kesepuluh RUU tersebut dapat diselesaikan, maka dengan penambahan 13 (tiga belas) RUU yang telah diselesaikan sebelumnya,

akhir Masa Sidang II nanti Dewan bersama dengan Presiden telah menyelesaikan pembahasan terhadap 23 (dua puluh tiga) RUU, termasuk RUU Kumulatif Terbuka.

Tujuh puluh (70) RUU Prioritas tahun 2010 menyebutkan bahwa 36 RUU diajukan oleh DPR dan 34 RUU diajukan oleh Presiden. Mengingat fungsi perundang-undangan menjadi tanggungjawab bersama DPR dan Pemerintah, maka sangat diperlukan sinergi antara kedua lembaga ini. Diperlukan tekad bersama untuk dapat memacu lahirnya UU yang sangat dinantikan masyarakat.

Dari 34 (tigapuluh empat) RUU Pemerintah tersebut, baru 9 (sembilan) RUU yang telah diajukan, 2 (dua) diantaranya telah selesai dibahas, yaitu RUU tentang Grasi, dan RUU tentang Pencegahan dan Tindak Pidana Pencucian Uang. Berkenaan dengan hal tersebut, baru-baru ini, Pimpinan DPR telah menyampaikan surat kepada Presiden untuk dapat mempercepat pengajuan 25 (duapuluh lima) RUU yang sekarang masih dalam proses penyusunan dan koordinasi antar kementerian di lingkungan Pemerintah.

Pimpinan DPR berkeinginan kuat dan mendorong agar Komisi-Komisi dan Pansus yang menangani RUU dapat menyelesaikan Draft dan Naskah Akademik, agar berbagai RUU segera memasuki pembahasan. Tata Tertib DPR

mengatur bahwa penanganan RUU dibatasi 2 (dua) kali Masa Sidang, ditambah 1 (satu) Masa Sidang apabila mendapat persetujuan rapat Badan Musyawarah.

### **Sidang Dewan Yang Terhormat,**

Terkait dengan fungsi perundang-undangan, Pimpinan Dewan menaruh perhatian terhadap penyelesaian **Paket RUU Bidang Politik**. Revisi UU Nomor 22 tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu yang ditangani oleh Komisi II, masih tertunda-tunda penyelesaiannya karena adanya substansi materi yang masih belum dicapai kata mufakat diantara fraksi-fraksi, yaitu keterlibatan Partai Politik pada jajaran Penyelenggara Pemilu. Revisi UU tentang Penyelenggara Pemilu harus segera diselesaikan, sebab tertundanya penyelesaian RUU ini, dikhawatirkan akan mengganggu persiapan Pemilu 2014 melalui tahapan-tahapan sebagaimana diatur oleh UU.

Pada Masa Sidang II ini, DPR juga sedang mempersiapkan Revisi UU Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik yang sudah memasuki pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM); Revisi UU Nomor 27 tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3); dan Revisi Kedua



atas UU Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. Pimpinan mengharapkan, pembahasan ketiga Revisi UU ini bisa diselesaikan tahun 2011.

RUU lain yang perlu mendapat perhatian, terutama berkaitan dengan perkembangan perekonomian nasional adalah RUU tentang Lembaga Keuangan Mikro, RUU Perubahan UU Nomor 9 tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang, RUU Perubahan UU Nomor 32 tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, dan RUU Perubahan UU Nomor 25 tahun 1992 tentang Koperasi, yang disiapkan oleh Komisi VI DPR.

RUU tentang Lembaga Keuangan Mikro sangat mendesak, karena UU ini dimaksudkan untuk memberdayakan usaha kecil, dan mendukung perluasan akses permodalan yang selama ini menjadi hambatan utama dalam upaya pengembangan dan pemberdayaan UMKM (Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah). Undang-undang ini diharapkan dapat mendukung program Pemerintah bagi kemandirian bangsa di sektor ekonomi.

## **Sidang Dewan Yang Terhormat,**

Dalam pelaksanaan fungsi anggaran, DPR perlu melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan APBN tahun 2010, mengingat Masa Persidangan II merupakan semester akhir dari Tahun Anggaran 2010. Melihat perkembangan pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2010 yang tersisa kurang-lebih satu bulan mendatang, Dewan berharap, apa yang sudah ditargetkan dapat dicapai, baik target asumsi ekonomi-makro seperti pertumbuhan ekonomi, target penerimaan negara, maupun belanja negara.

Terkait dengan realisasi belanja negara, Kementerian Keuangan mencatat, hingga tanggal 15 Oktober, realisasi belanja negara sebesar Rp. 681,69 triliun (60,5%) dari pagu anggaran dalam APBN-P Tahun Anggaran 2010 (Rp. 1.126,1 triliun). Realisasi tersebut terdiri atas belanja pemerintah sebesar Rp. 431,32 triliun (55,2%), dan transfer ke daerah Rp. 250,37 triliun (72,7%).

Berdasarkan komponen belanja pemerintah, belanja modal merupakan yang terendah, dengan realisasi sebesar Rp. 36,09 triliun (38%). Kemudian diikuti oleh belanja barang sebesar Rp. 58,14 triliun (51,6%), dan belanja pegawai Rp. 115,89 triliun (71,2%).

Dalam beberapa kesempatan, saya selaku pimpinan Dewan telah beberapa kali mengingatkan Pemerintah, untuk memperhatikan masalah rendahnya penyerapan anggaran. Rendahnya penyerapan anggaran, juga dapat disebabkan oleh sistem dan mekanisme perencanaan anggaran yang salah. Dewan mengingatkan Pemerintah untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama dalam hal penyerapan anggaran pada APBN Tahun Anggaran 2011 mendatang. Namun, dalam memberikan penilaian tentang pelaksanaan anggaran, hendaknya Pemerintah tidak hanya berdasarkan pantauan penyerapan anggaran, tetapi juga berdasarkan capaian kinerja atas program-program yang telah ditetapkan.

Dalam kaitan pelaksanaan anggaran 2010, pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan sebesar 5,8%, hendaknya dapat berimbas terhadap peningkatan pendapatan masyarakat dan mengurangi angka kemiskinan. Dewan melihat, telah banyak perbaikan ekonomi di berbagai sektor, namun dari 223 juta jiwa penduduk Indonesia, jumlah orang miskin juga masih cukup banyak. Untuk itu, Dewan mendesak Pemerintah untuk lebih kreatif dan memaksimalkan berbagai program dalam anggaran negara, yang secara langsung membantu mengatasi kemiskinan dan pengangguran.

Dana sebesar Rp. 49,3 trilliun untuk pemberantasan kemiskinan, harus dimaksimalkan antara lain melalui PNPM Mandiri (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri), KUR (Kredit Usaha Rakyat), hingga Program Keluarga Harapan. Tahun 2011 mendatang, Dewan telah menyepakati kebijakan penyerapan tenaga kerja sebesar 400.000 per 1% pertumbuhan ekonomi dan target penurunan kemiskinan dari 13,3% menjadi 11,5%-12,5%. Sedangkan target pertumbuhan ekonomi dalam APBN Tahun 2011 disepakati sebesar 6,4%.

### **Sidang Dewan yang Terhormat,**

Dalam fungsi pengawasan, berbagai permasalahan telah mendapat perhatian Dewan. Terkait dengan permasalahan di bidang hukum, masyarakat dan kalangan Dewan menyoroti Kasus Gayus si Mafia Pajak. Kasus Gayus Tambunan yang bisa keluar masuk Rumah Tahanan Korps Brimob Polri, membuktikan bahwa hampir semua proses penegakan hukum di Indonesia masih saja rawan dengan penyalahgunaan. Citra Badan Peradilan yang sudah buruk diperparah lagi dengan kasus-kasus semacam ini.

Dewan menghargai langkah cepat yang telah diambil oleh Kepolisian Republik Indonesia untuk menetapkan 9 (sembilan) Polisi Rutan Brimob menjadi tersangka dalam kasus kaburnya Gayus Tambunan dari Rutan. Namun demikian, masyarakat menunggu langkah-langkah lebih lanjut tentang pengungkapan secara tuntas terhadap kasus ini. Kepada Komisi III DPR-RI, Pimpinan mengharapkan agar secepatnya mengundang Pimpinan Polri, untuk meminta pertanggungjawaban terhadap kasus ini yang ditengarai sering terjadi. DPR perlu menagih janji Kapolri pada saat *fit and proper test*, untuk memberantas mafia hukum, termasuk institusi Polri.

Permasalahan hukum lainnya yang perlu mendapat perhatian adalah banyaknya korupsi yang dilakukan oleh Kepala Daerah. Sejak reformasi, terdapat kurang lebih 150 bupati/walikota dan gubernur yang bermasalah dengan kasus korupsi. Terhadap permasalahan tersebut, perlu dikaji faktor-faktor yang mengakibatkan fenomena ini, mengingat tidak semua kasus korupsi dilatarbelakangi motif yang sama. Beberapa faktor mungkin didorong motif biaya politik yang tinggi atau kurangnya pemahaman terhadap aturan penganggaran.

Untuk menekan eksekusi dari politik biaya tinggi, diperlukan adanya perbaikan sistem demokrasi kita, khususnya yang terkait dengan Pemilukada. Dalam hal mengurangi permasalahan terkait kekurangpahaman terhadap aturan penganggaran, maka perlu diadakan pembekalan terhadap Kepala Daerah yang dilakukan bekerjasama dengan instansi terkait. Sehingga pada akhirnya kemajuan demokrasi yang tengah kita rasakan sekarang ini, tidak menimbulkan efek negatif, dengan maraknya korupsi, kolusi, dan nepotisme yang berlawanan dengan semangat reformasi.

Dewan juga menyoroti pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi (*grand design* dan *road map* reformasi birokrasi), dan evaluasi terhadap *pilot-project* reformasi birokrasi, khususnya yang berkaitan dengan renumerasi pada 3 (tiga) kementerian/lembaga (MA, BPK, dan Kementerian Keuangan).

Remunerasi harus dikaitkan dengan sistem pengawasan dan akuntabilitas kinerja. Restrukturisasi lembaga non-struktural dalam rangka mekanisme percepatan penyelesaian *road-map*, penataan dan perampingan lembaga non-struktural, sedang diperdalam oleh Komisi terkait.

## **Sidang Dewan Yang Terhormat,**

Proses '*go-public*' Perusahaan Negara PT. Krakatau Steel (KS) yang menjual saham sebanyak 20% dari modal ditempatkan dan disetor perusahaan, belakangan ini mengundang perhatian Dewan dan masyarakat luas. Keputusan perusahaan untuk masuk ke Bursa Efek Indonesia merupakan terobosan bagus dan baik, terutama dalam rangka menambah modal perusahaan bagi pengembangan investasi. Kebijakan perusahaan untuk '*go-public*' memang lebih baik daripada kebijakan '*strategic sales*' yang ditempuh perusahaan pada tahun 2008 lalu. Tetapi, keputusan Pemerintah yang menetapkan penawaran umum perdana atau *Initial Public Offering* (IPO) senilai Rp. 850,- per lembar saham KS, dianggap terlalu rendah. Lebih kontroversial lagi, pada saat listing di Bursa Efek Indonesia sehari sesudahnya, harga saham melonjak tajam, dan terjadi penjualan besar-besaran oleh investor "berkualitas".

Banyak pertanyaan bahkan gugatan untuk membuktikan apakah tata-laksana penjualan perdana saham Krakatau Steel, sesuai dengan prosedur yang benar, tidak melanggar aturan, norma dan etika pasar modal. Untuk itu Dewan akan melakukan pemantauan dan meminta BPK-RI

untuk melakukan audit investigatif, baik terhadap PT. Krakatau Steel maupun *Under Writer*.

Dewan juga mengingatkan jajaran Direksi dan Komisaris, agar modal dari hasil penjualan saham perusahaan hendaknya dimanfaatkan sesuai dengan rencana strategis perusahaan, untuk meningkatkan kinerja dan bisnis inti, yakni peningkatan produksi besi dan baja guna memenuhi kebutuhan dalam negeri.

### **Sidang Dewan yang saya hormati,**

Pelaksanaan ibadah haji kembali menjadi perhatian Dewan, mengingat masih adanya keluhan Jemaah Haji Indonesia seputar pelaksanaan ibadah haji. Terkait dengan hal ini, Dewan telah membentuk 2 (dua) Tim Pengawas Pelaksanaan Ibadah Haji. Tim ini bertugas di awal pelaksanaan dan di saat pelaksanaan haji, guna memantau secara langsung, mulai dari pemondokan, transportasi, makanan jemaah haji dan pelayanan lainnya. Tim pengawas diharapkan dapat memberikan laporannya pada Masa Persidangan ini untuk perbaikan pelaksanaan ibadah haji tahun-tahun berikutnya.



Dewan berpendapat, Tim Pengawas Haji memang masih diperlukan, karena dari pengawasan tahun yang lalu telah berhasil menurunkan US\$ 80 ongkos naik haji sehingga menjadi rata-rata sebesar Rp. 31.080.600 dan mendekatkan pemondokan jamaah haji di ring I (jaraknya maksimal 2 km dari Masjidilharam) dan di ring II (2-4 km dari Masjidilharam) yang semula sampai pada ring V.

Hal lain yang mendapatkan perhatian Komisi Dewan, terkait hasil sementara Sensus Penduduk 2010. Jumlah penduduk Indonesia tercatat 237 juta jiwa. Ini berarti, jumlah penduduk Indonesia telah melampaui proyeksi semula sebesar 233 juta jiwa. Atau dapat dikatakan bahwa pertambahan penduduk Indonesia saat ini berkisar 1,3% dan masih jauh lebih tinggi dari pertumbuhan ideal untuk Indonesia yaitu 0,5%. Menyikapi kondisi tersebut, Komisi Dewan mendesak Pemerintah untuk segera menetapkan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menjadi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Perubahan badan ini secara fungsional sangatlah penting, sebagai upaya untuk

mengendalikan penduduk dan pembangunan keluarga, yang merupakan aset dalam mencapai tujuan nasional.

**Sidang Dewan yang saya hormati,**

Bila dilihat dari letak geologis dan geografisnya, Indonesia memiliki tingkat risiko tinggi mengalami bencana alam. Perubahan iklim yang berujung pada pemanasan global menyebabkan seringnya terjadi bencana yang terkadang secara ekstrem, seperti gempa tektonik, letusan gunung berapi, dan potensi tsunami. Sebagaimana yang terjadi baru-baru ini, banjir bandang telah terjadi di Wasior Papua Barat, gempa dan tsunami telah melanda Kepulauan Mentawai dan telah terjadi letusan Gunung Merapi di DIY/Jawa Tengah. Bencana ini, menimbulkan keprihatinan dan kesedihan mendalam, karena banyaknya korban jiwa meninggal, hilang, rusaknya sarana dan prasarana, serta memporak-porandakan wilayah pemukiman penduduk. Bencana-bencana ini juga menyebabkan pengungsian besar-besaran yang semuanya harus ditangani dengan cepat, tanggap, dan terkoordinasi.

Untuk itu, Pemerintah perlu segera menyusun Peta Wilayah Rawan Bencana. Wilayah yang telah dipetakan tersebut, diprioritaskan untuk mendapat penanganan awal

antisipasi bencana. Pemerintah Daerah juga dituntut untuk selalu waspada, karena Pemerintah Daerah menjadi garda terdepan membangun kesadaran rawan bencana termasuk sistem penanggulangannya.

Terhadap 3 (tiga) lokasi bencana di Wasior, Mentawai dan Merapi, DPR RI dan berbagai unsur yang ada didalamnya telah meninjau ke lokasi-lokasi tersebut. Selain menyampaikan bantuan dana, Dewan juga sudah melihat langsung kondisi lokasi bencana yang menjadi masukan bagi DPR dalam Rapat Kerja dengan Pemerintah dan Instansi terkait untuk masalah penanggulangan bencana.

Sebagaimana diketahui bahwa untuk penanggulangan bencana di dalam APBNP 2010, telah dialokasikan dana sebesar Rp. 3,7 triliun. Dari jumlah pagu tersebut, telah digunakan untuk pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi di Jawa Barat dan Sumatera Barat, serta penambahan dana kedaruratan (*on call* PNPB) sebesar Rp. 800 miliar, sehingga tersisa Rp. 2,9 triliun.

Badan Anggaran dan Komisi VIII, telah memberikan persetujuan untuk pencairan anggaran bagi program penanggulangan pasca bencana 2010 tahap I sebesar Rp. 1.962.000.000.000 (1 triliun 962 milyar rupiah) yang dibebankan pada **Bagian Anggaran 999.08 Jenis Belanja**

## **Bantuan Sosial Pos Penanggulangan Bencana Tahun Anggaran 2010** untuk 165 kabupaten/kota/provinsi.

Badan Anggaran telah memberikan persetujuan pencairan dana sebesar Rp. 150 Miliar dalam rangka penanganan darurat di Papua Barat danantisipasi kedaruratan sampai dengan Akhir Tahun Anggaran 2010, yang dibebankan pada Bagian Anggaran yang sama.

Badan Anggaran juga telah memberikan persetujuan tambahan anggaran tanggap darurat bencana Merapi sebesar Rp. 100 miliar untuk penanggulangan bencana Merapi/penggantian ternak, yang dibebankan pada bagian anggaran yang sama.

Dewan mendesak Pemerintah untuk memanfaatkan dana-dana tersebut tidak hanya difokuskan untuk memperbaiki infrastruktur dan berbagai fasilitas umum yang rusak saja, tetapi juga dapat menanggulangi masalah pengungsi akibat bencana.

Dalam kaitan dengan bencana Merapi, Dewan secara khusus telah membentuk **Posko DPR Peduli** di salah satu lokasi di Yogyakarta. Posko ini dimaksudkan untuk menyalurkan bantuan dari DPR dan Sekretariat DPR,

mengingat kondisi Merapi yang sampai saat ini belum menentu.

Disamping **Posko DPR Peduli**, Pimpinan juga memberikan apresiasi terhadap Isteri Anggota DPR yang turut memberikan partisipasinya dalam meringankan beban korban bencana. Demikian juga kepada Anggota DPR dari Dapil bencana, yang telah bekerja keras dan memberikan sumbangan terhadap daerah pemilihannya.

### **Sidang Dewan Yang Terhormat,**

Satu kepedihan lagi mengusik nurani kita adalah adanya salah seorang TKI asal Dompus NTB bernama Sumiati yang mengalami siksaan luar biasa dari majikannya di Arab Saudi beberapa waktu berselang. Bibirnya sumbing karena digunting, kulit kepala terkelupas, tubuh disetrika, muka rusak, kaki lumpuh dan berbagai penderitaan lain karena kejahannya perlakuan majikan. Perlakuan luar biasa biadab kembali dialami TKI Indonesia menyusul penderitaan sejumlah TKI yang mengalami kekejaman oleh majikan mereka bahkan ada yang dibunuh.

Kalangan Dewan mendukung Presiden/Pemerintah untuk melakukan langkah cepat bagi pengobatan dan

pengembalian TKI yang bersangkutan ke Tanah Air juga harus segera dilakukan tuntutan hukum yang tegas, dan pengadilan yang terbuka bagi majikannya oleh Pemerintah Saudi Arabia.

Manajemen TKI di bawah Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi harus konsisten melakukan perlindungan dan langkah-langkah konkret terhadap TKI di luar negeri. TKI sering mengalami siksaan oleh majikan, dan bahkan masih banyak yang dipenjara di Malaysia karena kedatangannya dianggap ilegal. Kepada Kementerian Luar Negeri, diminta segera bertindak untuk ikut menangani masalah ini melalui jalur diplomatik.

### **Sidang Dewan yang terhormat,**

Terkait dengan kiprah Indonesia di forum-forum internasional, Dewan menyambut positif posisi Indonesia sebagai **Ketua ASEAN tahun 2011**. Posisi tersebut harus benar-benar dimanfaatkan sebaik mungkin, tidak saja untuk memajukan ASEAN tetapi juga untuk memaksimalkan pencapaian kepentingan nasional. Kondisi politik, keamanan, ekonomi dan sosial budaya kawasan yang dinamis, memang menjadi satu tantangan tersendiri bagi kita untuk

menyelaraskannya dengan tujuan ASEAN dalam pembentukan Komunitas ASEAN 2015. Di dalam masa satu tahun memimpin ASEAN ini, diharapkan dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk menjadi langkah awal bagi kepemimpinan Indonesia dalam jangka panjang, untuk menggerakkan ASEAN menjadi lebih efektif dalam menjawab berbagai tantangan yang menanti di masa depan.

Dewan juga menyambut positif kedatangan sejumlah tamu negara yang berkunjung ke Indonesia beberapa waktu yang lalu, seperti Perdana Menteri Australia Julia Gillard, Presiden Amerika Serikat Barack Obama, Presiden Austria Heinz Fischer, dan Ketua Parlemen Cina Wu Bangguo. Kedatangan para tamu negara tersebut diharapkan akan semakin memperkuat hubungan bilateral Indonesia dengan negara-negara sahabat, dan juga semakin memperkokoh kedudukan Indonesia dalam percaturan global.

Dewan menghargai partisipasi Indonesia dalam berbagai forum internasional, termasuk kehadiran Presiden Republik Indonesia dalam KTT G-20 di Seoul dan forum APEC di Yokohama baru-baru ini. Dewan berharap, keterlibatan Indonesia dalam berbagai forum internasional benar-benar dapat membawa manfaat bagi kepentingan nasional.

## **Sidang Dewan yang terhormat.**

Masyarakat Internasional, para pemimpin dunia menyambut baik pembebasan Aung San Suu Kyi oleh rezim junta militer Myanmar. Aung San Suu Kyi tokoh politik pro-demokrasi, pemenang Nobel Perdamaian 1991, telah ditahan selama 15 Tahun. Pada era demokratisasi yang telah menjadi fenomena global dalam tata internasional yang terbuka, pembebasan tokoh politik ini dari kekuasaan Rezim Militer Myanmar menjadi hal yang sangat ditunggu, tidak hanya oleh para pendukungnya di Myanmar, tapi juga oleh masyarakat internasional termasuk ASEAN.

Perkembangan Myanmar memang perlu terus-menerus dicermati pasca Pemilu 7 November yang baru lalu, yang hasilnya masih diragukan. Indonesia sebagai Ketua ASEAN tahun 2011, perlu mengambil prakarsa lebih lanjut bagi pengembangan demokrasi di negara ini. DPR-RI berharap Parlemen di negara ini juga segera terbentuk.

Selanjutnya, mengakhiri Pidato Pembukaan ini perlu kami informasikan bahwa pada tanggal 25 November 2010 lusa, akan diperingati Hari Internasional Bagi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan atau "*The International Day for The Elimination of Violence Against Women*". Tahun 2009 tercatat sebanyak 33 Parlemen dari berbagai negara ikut



berpartisipasi memperingati acara penting ini, dengan melakukan berbagai kegiatan untuk memberikan dukungan terhadap penghapusan kekerasan terhadap perempuan di berbagai bidang. Tema peringatan tahun 2010 ini adalah "*Building Partnership to Combat Violence Against Woman*". DPR-RI bermaksud untuk mengambil bagian dalam peringatan ini dengan komitmen bersama: **"membangun kemitraan untuk memerangi kekerasan terhadap perempuan"**.

Inter-Parliamentary Union sebagai penggagas peringatan ini, menilai bahwa peran parlemen sangat penting dalam menjalin kemitraan dengan berbagai pihak seperti Pemerintah, swasta dan masyarakat. DPR-RI menegaskan komitmennya untuk menjadi **jangkar dalam kemitraan nasional** dengan berbagai pihak untuk melawan tindak kekerasan terhadap perempuan di Indonesia.

Untuk itulah, Pimpinan mengharapkan seluruh anggota DPR-RI hari ini, setelah rapat paripurna berakhir, **bersedia untuk menandatangani spanduk** yang telah disediakan di depan ruang paripurna sebagai bentuk dukungan dan komitmen kita untuk memerangi kekerasan terhadap perempuan. Kepada BKSAP yang menginisiasi kampanye ini, kiranya dapat menyelenggarakan kegiatan lanjutan dan

melakukan koordinasi dan kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk dengan organisasi nasional dan internasional.

**Sidang Dewan yang terhormat,**

Demikianlah pokok-pokok rencana kegiatan dan pandangan Dewan, terhadap berbagai permasalahan aktual yang terjadi selama masa reses. Selanjutnya, Pimpinan Dewan mengucapkan “Selamat Bertugas” dalam Masa Persidangan II. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan taufiq dan hidayah-Nya kepada kita semua. Amin ya Robbal Alamin. Sekian dan terima kasih.

***Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.***

**KETOK 3 X**

Jakarta, 22 November 2010

**KETUA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**Dr. H. Marzuki Alie**